

ANALISIS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Flora Novita Sianipar¹, Andini Mutia Afandi², Eva Hany Famida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: 25040674377@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674383@mhs.unesa.ac.id²
001901830evafamida@unesa.ac.id³, 0026119206meldahidayat@mhs.unesa.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendapatan daerah Kota Medan dan perannya dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, atau data yang dikumpulkan dari sumber lain seperti jurnal ilmiah, laporan, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Medan masih didominasi oleh Pendapatan Daerah Asli (PPN), dengan kontribusinya melebihi 50% dari total pendapatan. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik. Namun, realisasi PPN masih belum mencapai target, menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dan pengumpulan pendapatan daerah. Lebih lanjut, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dan keterlambatan pencairan Dana Pendapatan Dalam Negeri (PPN) patut diperhatikan. Mengenai masalah pengeluaran, ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran, yang menciptakan defisit anggaran dan alokasi belanja modal yang rendah, merupakan masalah serius. Pendapatan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun optimalisasi pengelolaannya sangat penting.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, PAD, APBD, Pembangunan Daerah, Kota Medan

Abstract - This study was conducted to analyze Medan City's regional revenue and support regional development. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The data used in this study is secondary data, or data collected from other sources such as scientific journals, reports, and documentation. The results of the analysis indicate that Medan City's regional revenue is still dominated by Original Regional Revenue (VAT), with its contribution exceeding 50% of total revenue. This reflects a fairly good level of fiscal independence. However, VAT realization has still not reached the target, indicating problems in the management and collection of regional revenue. Furthermore, the high dependence on fund transfers and delays in the disbursement of Domestic Revenue Funds (VAT) are noteworthy. Regarding expenditure issues, the imbalance between revenue and expenditure, which creates a budget deficit and low allocation of capital expenditure, is a serious problem. Regional revenue is a very important factor in supporting economic growth, but optimizing its management is crucial.

Keywords: Regional Income, PAD, APBD, Regional Development, Medan City

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah telah menjadi salah satu prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan pada era otonomi daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri. Langkah ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selain itu, penguatan tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah kini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien dan

akuntabel. Dalam praktiknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen utama yang mencerminkan kapasitas keuangan suatu daerah serta arah kebijakan pembangunannya. Pendapatan daerah, sebagai komponen inti APBD, memainkan peran krusial karena memungkinkan berbagai inisiatif pembangunan dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan. Kapasitas keuangan yang kuat adalah prasyarat bagi daerah untuk menjalankan strategi pembangunan yang inklusif (Kuncoro, 2014).

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Utara dan salah satu kota metropolitan terkemuka di Indonesia, Kota Medan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selain sebagai pusat administrasi, kota ini juga merupakan pusat perdagangan dan jasa yang vital. Kondisi ini menjadikan kapasitas keuangan Kota Medan sebagai aspek yang memerlukan pemantauan berkelanjutan, tidak hanya untuk kemajuan kota itu sendiri tetapi juga bagi wilayah tetangga seperti kawasan Mebidangro. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan secara konsisten berupaya memperkuat pendapatan daerah guna memastikan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga mewujudkan kota yang lebih maju, kompetitif, dan sejahtera bagi warganya.

Namun, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan menunjukkan fluktuasi antara target pendapatan dan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun. Misalnya, dalam APBD 2025, target pendapatan daerah menurun sekitar 8,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berpotensi memengaruhi penyesuaian belanja daerah dan memicu defisit anggaran. Dari segi komposisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendominasi, menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan, sebagian besar berasal dari pajak daerah seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menyoroti kebutuhan akan analisis mendalam terhadap struktur, potensi, dan kinerja pendapatan daerah di Kota Medan.

Urgensi menganalisis pendapatan daerah semakin diperkuat oleh temuan penelitian di berbagai daerah lain, yang menunjukkan bahwa unsur-unsur seperti PAD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pengelolaan pendapatan daerah harus mempertimbangkan efektivitas pemanfaatannya dalam bentuk pengeluaran daerah. Lambatnya pencairan pengeluaran, yang sering terjadi pada awal tahun anggaran, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi meskipun pendapatan daerah relatif memadai. Oleh karena itu, analisis pendapatan daerah tidak boleh terbatas pada angka-angka semata, tetapi juga harus mencakup strukturnya, efisiensi pengelolaan, dan alokasinya ke sektor-sektor pembangunan prioritas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan daerah Kota Medan dan mengeksplorasi kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan dan potensi Kota Medan. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Desentralisasi fiskal di negara berkembang menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pajak agar tidak terjebak pada ketergantungan transfer pusat (Bahl & Bird, 2018).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis

bagaimana pengelolaan pendapatan daerah di Kota Medan serta bagaimana perannya dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti mencoba menjelaskan kondisi tersebut secara lebih mendalam berdasarkan berbagai dokumen dan literatur yang tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data tersebut diperoleh melalui kajian literatur. Penelaahan laporan keuangan dalam penelitian ini juga mengacu pada standar pelaporan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Mulyani (2019). Sumber data berasal dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur dan Komposisi Pendapatan Daerah Kota Medan

Data APBD Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Susunan ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Kota Medan yang cukup baik. Menurut Yusuf (2017), rasio PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai aktivitasnya tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Target pendapatan daerah yang disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Kota Medan dalam APBD 2025 sebesar Rp7,44 triliun. Sumber terbesar berasal dari PAD yang mencapai Rp4,1 triliun, atau sekitar 55,1 persen dari keseluruhan pendapatan daerah. Komponen lain meliputi dana transfer senilai Rp3,23 triliun (43,47 persen) serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp106,46 miliar.

Susunan ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Kota Medan yang cukup baik, mengingat porsi PAD melampaui 50 persen. Menurut Mardiasmo (2018), semakin besar kontribusi PAD suatu daerah, semakin tinggi kemandiriannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meskipun demikian, ketergantungan pada dana transfer yang mencapai 43,47 persen menandakan bahwa Kota Medan belum sepenuhnya lepas dari dukungan fiskal pemerintah pusat (Bahl & Bird, 2018).

**STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp4,10 triliun	55,10%
2.	Dana Transfer	Rp3,23 triliun	43,47%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp106,46 miliar	1,43%
Total Pendapatan Daerah		Rp7,44 triliun	100%

Sumber: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2025 tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (diolah dari data Pemerintah Kota Medan)



Sumber: Portal Resmi Pemerintah Kota Medan
https://portal.medan.go.id/berita/rapbd-kota-medan-2025-disahkan-wali-kota-medan-harus-jadi-stimulus-tumbuh-dan-berkembang-perkonomian-kota_reud4653.html

Gambar 1. Struktur Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025

2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Komponen Utama PAD

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dalam APBD 2025 sebesar Rp4,1 triliun sebagian besar bergantung pada penerimaan pajak daerah. Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi PAD masih di bawah target, hanya mencapai 79,21 persen atau sekitar Rp2,67 triliun. Kondisi ini menyoroti adanya kesenjangan antara target dan pencapaian yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah.

Komponen PAD dengan potensi terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target PBB-P2 dalam APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp792 miliar, dengan realisasi hingga Desember 2025 mencapai Rp601,53 miliar atau 75,88 persen. Sektor pendukung lainnya mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya dari hotel dan restoran serta pajak reklame. Hasil ini sejalan dengan pandangan Resmi (2017) bahwa pajak daerah menjadi instrumen kunci untuk memperkuat pendapatan daerah, meskipun pengelolaannya memerlukan perbaikan. Selain itu, sistem pemungutan saat ini harus mulai beradaptasi dengan regulasi terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Penelitian Fatmayani & Asalam (2025) yang mengkaji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan periode 2019-2024 menemukan bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menegaskan urgensi evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Medan. Optimalisasi pajak daerah seperti PBB-P2 sangat bergantung pada validitas data objek pajak dan kepatuhan administratif wajib pajak (Siahaan, 2016).

Keterangan	Target 2025	Realisasi s.d.Desember	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	Rp4,1 triliun	Rp2,67 triliun	79,21%
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp729 miliar	Rp601,53 miliar	75,88%

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2025.

3. Tantangan dalam Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Pertama, realisasi PAD yang masih rendah hingga akhir tahun mencerminkan masalah pada proses pengumpulan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menyatakan bahwa pencapaian PAD diperkirakan hanya sekitar 85 persen dari target pada penutupan tahun 2005.

Kedua, isu dana transfer turut menjadi hambatan. Ketua DPRD Kota Medan menyampaikan kekhawatiran terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data mencatat kekurangan alokasi sebesar Rp279,81 miliar, yang terdiri dari sisa penyaluran tahun 2024 senilai Rp166,85 miliar dan bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp112,96 miliar. Penundaan DBH ini berdampak pada stabilitas keuangan daerah serta pendanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan. Menurut Sidik (2002), ketidakpastian waktu penyaluran dana bagi hasil seringkali mengganggu jadwal pelaksanaan proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.

Ketiga, dinamika belanja daerah juga memengaruhi efektivitas pendapatan dalam mendukung pembangunan. Pada Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direvisi menjadi Rp6,96 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,07 triliun, yang mengakibatkan defisit anggaran. Kondisi ini semakin rumit dengan rendahnya realisasi belanja daerah pada semester pertama, yang menarik perhatian DPRD Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu diikuti oleh pengalokasian belanja modal yang ideal, karena seringkali terserap oleh belanja rutin (Darwanto & Yudhistira, 2007).

Permasalahan	Data Pendukung	Dampak
Realisasi PAD belum mencapai target	Targer PAD Rp4,1 triliun,realisasi diperkirakan sekitar 79,21%-85% hingga akhir 2025	Menunjukkan masih rendahnya optimalisasi pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak
Kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH)	Kekurangan DBH sebesar Rp279,81 miliar terdiri dari sisa 2024 Rp166,85 miliar dan tahun 2025 Rp112,96 miliar	Menghambat stabilitas keuangan daerah dan pendanaan pembangunan
Defisit pada P-APBD 2025	Pendapatan Daerah Rp6.96 triliun sedangkan belanja daerah Rp7,07 triliun	Menyebabkan defisit anggaran dan keterbatasan ruang fiskal pemerintahan daerah
Rendahnya Realisasi belanja daerah semester 1	Menjadi perhatian DPRD Kota Medan	Program Pembangunan dan pelayanan publik berjalan kurang optimal

Tabel 2. Kendala Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2025

Berdasarkan revisi anggaran Kota Medan 2025,pendapatan daerah turun menjadi Rp6,96 triliun,sementara pengeluaran daerah mencapai Rp7,07 triliun,sehingga terjadi defisit anggaran.Situasi ini mencerminkan tekanan fiskal yang signifikan pada keuangan daerah.Selain itu keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil (BPP) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,sebesar Rp279,81 miliar,juga mengganggu stabilitas pendanaan program pembangunan.Kegagalan Pendapatan Daerah (PPN) untuk mencapai target pada akhir tahun menunjukkan tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan,khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan efektivitas mekanisme pengumpulan pajak daerah.

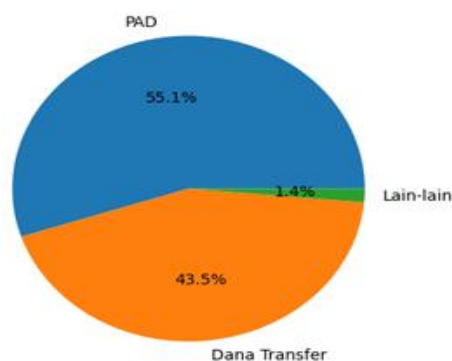
4. Peran Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam memacu pembangunan ekonomi Kota Medan. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 menunjukkan nilai ekonomi mencapai Rp329,61 triliun dengan pertumbuhan 5,07 persen. Sektor perdagangan grosir dan eceran mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp87,9 triliun atau 25,98 persen dari total PDRB, diikuti oleh konstruksi (Rp60,69 triliun) dan industri pengolahan (Rp46,35 triliun). Data pertumbuhan ekonomi ini secara detail tercatat dalam laporan Badan Pusat Statistik Kota Medan (2025).

Studi Fatima (2024) mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, serta jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan periode 2010-2017 menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini didukung oleh penelitian Wandira (2013) yang menyatakan bahwa PAD dan belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap gerak ekonomi di tingkat lokal. Keseimbangan fiskal inilah yang menentukan ketahanan anggaran sebuah kota dalam jangka panjang (Savitri, 2016).

Melalui RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kota Medan mengusung visi “Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan penekanan pada infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan sumber daya manusia. Realisasi visi ini bergantung pada optimalisasi pendapatan daerah.

Struktur Pendapatan Daerah Kota Medan 2025



Gambar 2. Struktur Pendapatan Daerah Kota Medan

Gambar 1 menunjukkan struktur pendapatan daerah Kota Medan pada tahun anggaran 2025 yang didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik karena lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari potensi internal daerah. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat masih memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar 43,47%, yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih ada. Adapun lain-lain pendapatan yang sah memiliki kontribusi yang relatif kecil yaitu sebesar 1,43%. Komposisi ini menggambarkan bahwa meskipun Kota Medan sudah cukup mandiri, optimalisasi sumber pendapatan lain masih perlu ditingkatkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan daerah memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan Kota Medan. Berbagai unsur pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta sumber lainnya, menjadi tulang punggung pembiayaan infrastruktur pembangunan dan pelayanan publik. Kontribusi PAD yang melebihi 50 persen menggambarkan kemandirian fiskal Kota Medan yang cukup solid, meskipun masih ada ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, implementasinya diwarnai oleh beberapa kendala. Realisasi PAD yang belum mencapai target menandakan bahwa pengelolaan serta pemungutan pendapatan daerah belum optimal. Dominasi ketergantungan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) masih terlihat jelas, sementara potensi sumber pendapatan lain belum dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, penundaan pencairan dana transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), turut mengancam kestabilan keuangan daerah. Dari perspektif belanja daerah, ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sering kali menyebabkan defisit anggaran. Alokasi belanja modal yang minim mencerminkan pemanfaatan pendapatan daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang belum maksimal. Ironisnya, pendapatan daerah justru esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh pengaruhnya terhadap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). Kota Medan Dalam Angka 2025. Medan: BPS Kota Medan.
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries. Edward Elgar Publishing.
- Darwanto, & Yudhistira, D. (2007). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 22(4).
- Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi. (2025, July 10). Musrenbang RPJMD 2025-2029 & RKPD 2026 Kota Medan: Dari bencana menuju aksi nyata.
- Fatima, S. S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan Tahun 2010-2017. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Fatmayani, D. P., & Asalam, A. G. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2024. Open Library Publications Telkom University.
- Halim, A. (2016). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat. <https://sdabmbk.medan.go.id/berita/musrenbang-rpjmd-2025-2029-rkpd-2026-kota-medan-dari-bencana-menuju-aksi-nyata.html>
- Kuncoro, M. (2014). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, S. (2019). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kota Medan. (2025, September 30). Plt. Kadis SDABMBK Hadiri Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Perubahan APBD Kota Medan TA 2025. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi Kota Medan. <https://www.sdabmbk.medan.go.id/berita/plt-kadis-sdabmbk-hadiri-sidang-paripurna-pengambilan-keputusan-dan-persetujuan-perubahan-apbd-kota-medan-ta-2025.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rahmawan, A. (2012). Perpajakan daerah dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Jakarta: Rajawali Press.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, E. (2016). The Effect of Local Revenue, Special Allocation Fund, and General Allocation Fund on Capital Expenditure. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(10).
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik, M. (2002). Dana Alokasi Umum: Konsep dan Hambatan. Jakarta: KPPOD.
- Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 341-354.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Antara News Sumatera Utara. (2024, September 12). DPRD-Pemkot Medan sahkan APBD 2025, pendapatan sebesar Rp7,44 triliun. <https://sumut.antaranews.com/berita/589027/dprd-pemkot-medan-sahkan-apbd-2025-pendapatan-sebesar-rp744-triliun>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).

Waspada. (2025, October 9). Ketua DPRD prihatin dan desak Pemprov Sumut tuntaskan kewajiban DBH untuk Pemko Medan. https://www.waspada.id/medan/ketua-dprd_prihatin-dan-desak-pemprov-sumut-tuntaskan-kewajiban-dbh-untuk-pemko-medan/

Yusuf, M. (2017). Analisis Keuangan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.